



# newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 130, Mei 2020



Gubernur Lemhannas RI menjadi Narasumber dalam Diskusi Online terkait Ketahanan Nasional di Tengah Pandemi COVID-19 .....	2
Menpan RB: Siapa pun Pimpinannya, Birokrasi Harus Profesional.....	3
15.500 Bantuan Alat Kesehatan untuk Tenaga Medis dalam Menghadapi COVID-19 ...	4
Presiden Joko Widodo: Tahun 2021 Adalah Tahun Recovery.....	5
Kepala BNN: Jalin Kerja Sama Putus Rantai Penyebaran Narkoba .....	6
Perista Lemhannas RI Berikan Bantuan Buku Tulis Sebagai Upaya Mendukung Pendidikan Bangsa .....	7
Gubernur Lemhannas RI Menjadi Narasumber dalam Diskusi Online Mengenai Perlibatan Militer dalam Pemberantasan Terorisme .....	8
Komisaris Jenderal Polisi Drs. Didid Widjanardi, S.H. dilantik menjadi Sekretaris Utama Lemhannas RI .....	9
Peringati HUT ke-55, Lemhannas RI Rayakan secara Sederhana .....	10
Upacara peringatan HUT Lemhannas RI ke-55 .....	11

## Upacara Peringatan HUT Lemhannas RI ke-55

# Gubernur Lemhannas RI Menjadi Narasumber dalam Diskusi Online terkait Ketahanan Nasional di Tengah Pandemi COVID-19



**G**ubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjono menjadi narasumber dalam Diskusi Online yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), pada Senin, (27/4). Diskusi online tersebut mengangkat topik “Belajar dari Dunia Mengatasi COVID-19” dengan tema “Ketahanan Nasional Indonesia, Mampukah Atasi COVID-19?”.

Mengawali materinya, Agus menyampaikan pengertian mengenai pertahanan, keamanan, dan ketahanan. Pertahanan secara universal adalah keadaan yang dihadapkan kepada ancaman dari luar negeri dan bersifat militer. Sedangkan keamanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dalam negeri dan merupakan wilayah yuridis serta ancaman datang dari dalam negeri. Ancaman yang datang dari dalam negeri pada hakikatnya adalah pelanggaran hukum, maka

dapat direspons dengan penegakan hukum. Sementara itu, ketahanan merupakan daya tahan suatu bangsa dan lebih tepat dikategorikan di dalam lingkup dan materi keamanan insani yakni ancaman yang mengancam warga negara secara individual. Ancaman nonfisik, seperti COVID-19, termasuk dalam lingkup ketahanan.

Agus berpendapat bahwa ketahanan nasional diperlukan untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan untuk mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional diwujudkan melalui dua pendekatan yakni Pendekatan Gatra dan Pendekatan Spasial Geografis. Pendekatan Gatra terdiri dari Ideologi, Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Ketahanan tiap gatra akan mempengaruhi ketahanan nasional. Sementara itu, Pendekatan Spasial Geografis dipengaruhi oleh ketahanan tiap provinsi atau daerah.

Ketahanan nasional di tengah masa pandemi COVID-19 dapat dirasakan dalam wujud kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti kebijakan keringanan biaya listrik, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), larangan mudik, keringanan kredit, dan prioritas anggaran kesehatan. Agus tidak memungkiri bahwa setiap kebijakan tidak bisa memuaskan semua pihak, pasti ada yang sependapat dan kurang sependapat. Agus menegaskan bahwa hal tersebut wajar terjadi dalam sebuah demokrasi, menurutnya hal tersebut bukanlah suatu masalah jika semua gagasan dan tanggapan yang diberikan didasarkan pada konsensus dasar bangsa.

Faktor sukses dan efektifnya sebuah kebijakan publik, lanjut Agus, adalah kebijakan nasional yang terpadu, mencakup level horizontal artinya lintas sektor dan level vertikal yakni keterpaduan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, juga melakukan perhitungan kemampuan anggaran dengan menentukan skala prioritas yang tajam dan pertimbangan risiko. “Pembuatan kebijakan publik harus berdasarkan pada pengetahuan dan kompetensi serta harus terintegrasi,” kata Agus.

Pada kesempatan tersebut Agus juga menyampaikan duka atas gugurnya sejumlah tenaga medis yang bertugas. “Gugurnya tenaga medis adalah kehilangan strategis yang cukup besar bagi bangsa, karena untuk mencetak seorang tenaga medis memerlukan waktu yang tidak sedikit,” kata Agus.

# Menpan RB: Siapa pun Pimpinannya, Birokrasi Harus Profesional

**M**enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memberikan materi dengan judul "Strategi Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Baik" kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60, pada Selasa (28/4).

Munurut Tjahjo, saat ini alur pengambilan keputusan di Indonesia sangat panjang. Kini Indonesia sekilas terlihat seperti negara peraturan dengan banyaknya aturan yang ada saat ini, baik peraturan dari pemerintah pusat maupun daerah. Tjahjo menyampaikan bahwa banyaknya peraturan tersebut sedikit banyak dapat menghambat proses pertumbuhan.

Untuk menangani hal tersebut, maka penyederhanaan birokrasi dirasa dapat menjadi upaya untuk mempercepat pengambilan keputusan melalui disposisi dan komunikasi yang lebih fleksibel. "Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dikaitkan dengan penyederhanaan birokrasi semata-mata untuk membangun sebuah proses pengambilan keputusan yang cepat," ujar Tjahjo.

Menyederhanakan birokrasi juga merupakan respons pemerintah terhadap tantangan-tantangan global yang saat ini dihadapi. Dewasa ini, pengambilan keputusan dan transformasi digital semakin dituntut memiliki standar sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berdaya. Kemudian Tjahjo menyampaikan siapa pun yang menjadi pimpinan dan dengan latar belakang apa pun, harus menciptakan birokrasi yang profesional. "Siapa pun yang menjadi



pimpinan, ditingkat mana pun, birokrasi harus profesional dan melayani masyarakat," tutur Tjahjo.

*Road Map* reformasi birokrasi saat ini memiliki beberapa tujuan dan sasaran yakni adanya ukuran keberhasilan, strategi, program kegiatan, serta organisasi pengelola reformasi birokrasi yang minimal dipersiapkan untuk jangka pendek yakni lima tahun ke depan. "Sekarang sudah ada reformasi birokrasi, tapi hanya kulit-kulitnya. Bertahap untuk sampai langsung ke jantungnya," ujar Tjahjo.

Hal tersebut bertujuan terciptanya skala prioritas bagi setiap instansi yakni perbaikan tata kelola yang harus sesuai karakteristik, isu, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Tjahjo juga menekankan bahwa *road map* tidak hanya bersifat formalitas.

Selain mengolah reformasi birokrasi secara kolaboratif, Menpan RB



**Siapa pun yang menjadi pimpinan, ditingkat mana pun, birokrasi harus profesional dan melayani masyarakat**

**Tjahjo Kumolo**

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

juga akan melakukan evaluasi tahunan kepada setiap instansi. Tujuan evaluasi tersebut adalah untuk memetakan tahapan-tahapan kemajuan setiap instansi dan mengetahui hal-hal yang harus diperbaiki. Evaluasi tersebut juga akan menjadi barometer pengukur kecepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh instansi.

# 15.500 Bantuan Alat Kesehatan untuk Tenaga Medis dalam Menghadapi COVID-19



Lemhannas RI menyalurkan bantuan sejumlah 15.500 alat kesehatan yang terdiri dari 500 Alat Pelindung Diri (APD), 10.000 Sarung Tangan Medis, dan 5.000 Masker kepada sejumlah pihak yang membutuhkan. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo kepada beberapa perwakilan tenaga medis untuk distribusikan langsung ke beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas pada Rabu (29/4), di Ruang Nusantara.

Penyerahan bantuan alat kesehatan secara simbolis diterima oleh dr. Damayanti Soetjipto Sp.THT-KL(K), Prof. dr. Ruswan Dahlan, Sp.An-KIC, Prof. dr. Ganesja Harimurti, Sp.JP(K), dr. Yvonne Siboe, Sp.Ak., dr. Niesye, dr.

Dien Radjak, dan dr. Muhammad Rifki, Sp.OG. Penyerahan bantuan secara simbolis tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

"Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan tenaga medis yang telah menjadi garda terdepan untuk berjuang dan berkorban luar biasa dalam menghadapi pandemi Coronavirus Disease (COVID-19)," kata Agus membuka sambutannya.

Pada kesempatan tersebut Agus juga menyampaikan duka cita atas gugurnya sejumlah tenaga medis saat menjalankan tugas misi kemanusiaan. "Pengorbanan mereka tidaklah sia-sia dan akan selalu kita ingat," tutur Agus. Kemudian Agus juga menyampaikan

bahwa Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas melalui telekonferensi, memerintahkan diterapkannya perlindungan optimal bagi dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya dalam menangani pandemi COVID-19.

Sebagian alat kesehatan yang disumbangkan merupakan bantuan yang dipercayakan oleh Tanoto Foundation kepada Lemhannas RI. Oleh karena itu, penyaluran bantuan tersebut juga merupakan komitmen atas kepercayaan yang diberikan kepada Lemhannas RI dan salah satu langkah nyata Lemhannas RI dalam mendukung penanganan COVID-19. Lemhannas RI percaya bahwa pandemi ini merupakan sebuah tantangan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama.

# Presiden RI Joko Widodo: Tahun 2021 Adalah Tahun Recovery



**G**ubernur dan Wakil Gubernur Lemhannas RI mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2020 dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, pada Kamis, (30/4) melalui video conference call.

Pada kesempatan tersebut Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dr. HC. Ir. H. Suharso Monoarfa dalam laporannya menyampaikan bahwa selain mempertimbangkan kebijakan Work From Home (WFH), Musrenbang virtual juga merupakan salah satu cara baru dalam merespon kebijakan e-government yang responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis yang berkembang.

Pelaksanaan Musrenbangnas sangat penting dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang erat kaitannya dengan tantangan yang dihadapi saat ini. "Skenario agenda pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 menjadi bagian penting

dalam kerangka ekonomi makro RKP 2021," kata Suharso.

Presiden RI Joko Widodo dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa Musrenbangnas adalah siklus tahunan untuk merencanakan pembangunan tahun selanjutnya, dalam hal ini tahun 2021. "Perencanaan pembangunan 2021 harus betul-betul adaptif dengan perkembangan situasi yang kita hadapi saat ini, apa yang kita kerjakan tahun ini akan memberi rekomendasi bagi tahun yang akan datang," kata Presiden.

Selanjutnya Presiden menyampaikan bahwa di Tahun 2020 ini, Pemerintah sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian target pembangunan dan melakukan realokasi dan re-focusing belanja negara secara besar-besaran. Anggaran diprioritaskan pada 3 hal yakni kesehatan, jaring pengaman sosial bagi warga miskin, serta stimulus ekonomi agar pelaku usaha bisa bertahan dan mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Presiden juga mengajak seluruh peserta Musrenbangnas untuk bergerak cepat,

walaupun belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir, demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia.

"Saya optimis tahun 2021 adalah tahun recovery, tahun pemulihan, dan tahun rebound," ujar Presiden. Kemudian Presiden menyampaikan bahwa selain kecepatan dalam mengatasi COVID-19, diperlukan juga kecepatan untuk melakukan pemulihan setelah pandemi berakhir. Menurut Presiden, negara yang akan menjadi pemenang bukan hanya negara yang berhasil cepat mengatasi COVID-19, tetapi juga negara yang cepat melakukan pemulihan.

Presiden menegaskan bahwa dibutuhkan sinergi yang kuat dan kerja sama yang terjalin erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai dari pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sampai pemerintah desa. Tiap lapisan pemerintah harus berjalan dalam satu visi, satu arah, dan satu kebijakan yang solid. "Saya meyakini dengan sinergi, berbagai dampak dari pandemi global ini dapat segera kita atasi," ujar Presiden.

# Kepala BNN: Jalin Kerja Sama Putus Rantai Penyebaran Narkoba



**Dalam mengatasi pola perdagangan narkoba internasional di Indonesia BNN dalam hal ini sudah banyak bekerja sama dengan penegak hukum negara-negara lain**

**Heru Winarko**  
Kepala Badan Narkotika Nasional RI

**K**epala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Heru Winarko memberikan ceramah dengan judul “Bersinergi Menyelamatkan Generasi dan Menjaga Negeri dari Ancaman Kejahatan Narkoba” kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60, pada Selasa, (5/5).

Diawal ceramahnya, Heru menyampaikan bahwa Narkotika tidak hanya heroin, ekstasi, dan ganja namun juga ada *New Psychoactive Substances* (NPS). Hingga kini sudah ada 950 jenis NPS yang beredar di dunia dan 76 diantaranya sudah beredar di Indonesia. Saat ini, jenis NPS yang beredar di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018. “Siapapun yang terbukti menyalahgunakan jenis NPS, akan menerima hukuman sebagaimana hukuman Narkotika,” kata Heru.

Kondisi geografis Indonesia yang dua pertiganya merupakan

perairan dimanfaatkan sebagai jalur favorit oleh berbagai sindikat dalam menyelundupkan narkoba dari luar negeri. Oleh karena itu, BNN bekerja sama dengan berbagai pihak untuk semakin memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk ke Indonesia sebagai salah satu cara untuk menekan peredaran narkoba di Indonesia yang akan memutus jalur pasokan narkoba.

Tidak hanya menjalin kerja sama dengan penegak hukum di dalam negeri, BNN juga bekerja sama dengan pihak-pihak luar negeri untuk bersama-sama memutus rantai penyelundupan narkoba. “Dalam mengatasi pola perdagangan narkoba internasional di Indonesia BNN dalam hal ini sudah banyak bekerja sama dengan penegak hukum negara-negara lain,” tutur Heru.

BNN juga menyadari ancaman kejahatan *cyber* dalam pededaran narkoba, perkembangan teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk memproduksi ataupun

mengedarkan narkoba dengan lebih mudah, murah, dan tidak terdeteksi. Kejahatan *cyber* yang pertama adalah *Surface Web Market* yakni peredaran narkoba dilakukan melalui media sosial dan situs web. Kemudian *Deep Web Market* yaitu mengedarkan narkoba melalui jaringan internet tersembunyi yang sangat sulit dilacak. Terakhir adalah *Cryptomarket* yaitu transaksi menggunakan *crypto-currency* melalui internet, cara ini tidak mudah dilacak dan menyembunyikan identitas pengguna.

Dalam menghadapi ancaman kejahatan narkoba, BNN membuat kebijakan dan strategi salah satunya adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang terdiri dari langkah Pencegahan dengan membangun sistem kemampuan masyarakat, Pemberantasan, dan Rehabilitasi.

# Perista Lemhannas RI Berikan Bantuan Buku Tulis Sebagai Upaya Mendukung Pendidikan Bangsa



**D**alam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Lemhannas RI, Persatuan Istri Anggota (Perista) Lemhannas RI bekerja sama dengan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO mengadakan Bakti Sosial Penyerahan Bantuan Buku Tulis Kepada Putra Putri Anggota Lemhannas RI. Penyerahan bantuan sebanyak 2680 buku tulis tersebut dilakukan secara simbolis kepada beberapa perwakilan anggota Lemhannas RI pada Selasa (12/5), di Ruang Nusantara, Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para donatur yang sudah memberikan bantuan buku tulis yang juga merupakan salah satu upaya bersama dalam mendukung pendidikan generasi penerus bangsa.

Agus menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka putus



**Dalam konteks ketahanan nasional, terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh berawal dari penyiapan dan pembentukan generasi penerus bangsa yang dimulai sejak dini, yakni dimulai sejak tingkat sekolah dasar**

**Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo**  
Gubernur Lemhannas RI

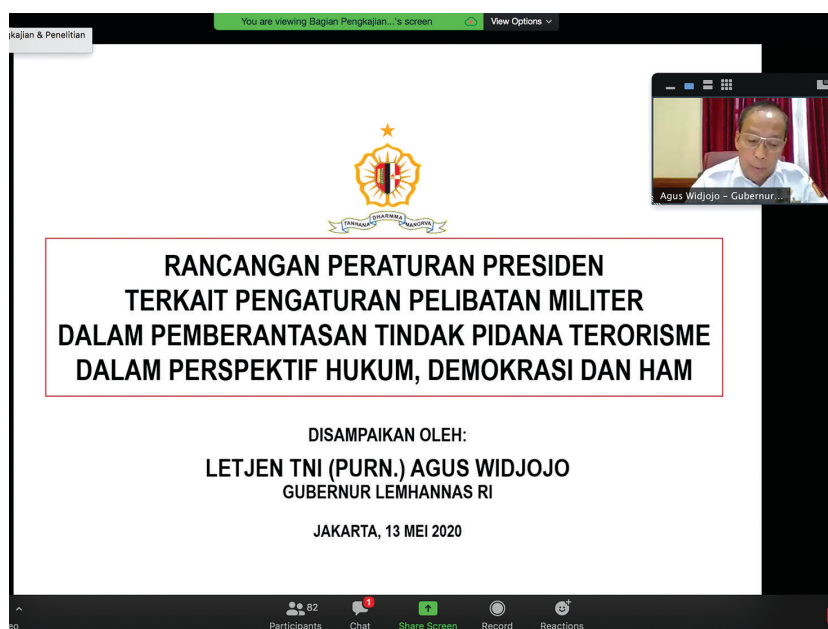
sekolah anak Indonesia. "Hal ini tentu sejalan dengan salah satu cita-cita bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," kata Agus.

Menurut Agus, pemberian bantuan buku tulis yang berasal dari beberapa donatur yakni Dr. I Putu Gede Ary Suta, Keluarga Ingrid Sutardjo, dan Bank SBI Indonesia, merupakan bentuk perhatian dan peran bersama sebagai orang tua dalam mengurangi angka putus sekolah serta mendidik generasi bangsa sejak dini, yang merupakan langkah untuk mempersiapkan penerus bangsa.

Agus juga menyampaikan bahwa dalam perspektif pembangunan bangsa, penyiapan dan pembentukan generasi penerus bangsa merupakan proses panjang yang harus dimulai sejak dini.

Oleh karena itu, pendidikan dan pengasuhan anak di usia dini merupakan titik awal pembangunan manusia yang perlu mendapat perhatian yang pertama dan utama. "Dalam konteks ketahanan nasional, terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh berawal dari penyiapan dan pembentukan generasi penerus bangsa yang dimulai sejak dini, yakni dimulai sejak tingkat sekolah dasar," kata Agus.

# Gubernur Lemhannas RI Menjadi Narasumber dalam Diskusi Online Mengenai Perlibatan Militer dalam Pemberantasan Terorisme



**Kalau ada yang berpendapat bahwa tidak perlu hukum, maka kita bertanya apa titik persamaan melihat suatu persoalan kalau tidak didasarkan pada hukum**

**Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo**  
Gubernur Lemhannas RI

terorisme, harus diletakan pada dasar dan kerangka hukum yang jelas. Hukum merupakan kesepakatan untuk mengatur segala sesuatu dalam kehidupan bersama. "Kalau ada yang berpendapat bahwa tidak perlu hukum, maka kita bertanya apa titik persamaan melihat suatu persoalan kalau tidak didasarkan pada hukum," tutur Agus.

Selanjutnya Agus menyatakan bahwa upaya penindakan terorisme pada hakikatnya merupakan pelanggaran hukum pidana yang membutuhkan respon penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, yang dilakukan oleh Polri dan sudah efektif ditangani. Sedangkan militer tidak pernah dirancang untuk menjadi penegak hukum dan tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut, tetapi bisa membantu. TNI bisa dibawa untuk masuk dalam wilayah kamanan dalam negeri dengan berdasarkan Perpres yang hendaknya teknisnya diwadahi dalam sebuah UU perbantuan TNI kepada otoritas sipil di masa damai.

**G**ubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, menjadi salah satu narasumber Diskusi Publik yang mengangkat topik "Polemik Rancangan Peraturan Presiden Terkait Pengaturan Pelibatan Militer Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum, Demokrasi, dan HAM" pada Rabu (13/5) yang dilakukan dalam jaringan (daring).

Dalam kesempatan tersebut, Agus menyampaikan bahwa Peraturan Presiden tentunya harus mempunyai kedudukan dalam hierarki sistem hukum, harus merupakan satu garis konsistensi. "Selain harus berada dalam satu garis konsistensi dari segi prosedur tatanan, Perpres harus juga satu garis konsistensi dari segi konten dan substansi," jelas Agus.

Kemudian Agus menjelaskan pada dasarnya Konstitusi UUD 1945 memberikan mandat kepada TNI sebagai pelaksana utama fungsi pertahanan nasional. Pertahanan pada dasarnya diartikan sebagai kemampuan menghadapi ancaman militer dari luar negeri, mempertahankan kedaulatan, dan keutuhan wilayah.

Menurut Agus hal tersebut bukan berarti tidak ada ancaman dari dalam negeri, tetapi setiap ancaman yang datang dari dalam negeri pada dasarnya adalah tindakan pelanggaran hukum maka harus ditindak oleh penegak hukum. Di sisi lain, TNI tidak pernah dirancang untuk menjadi penegak hukum.

Berdasarkan hal tersebut Agus menyampaikan bahwa semua, termasuk peran TNI dalam memberantas



# Komisaris Jenderal Polisi Drs. Didid Widjanardi, S.H. dilantik menjadi Sekretaris Utama Lemhannas RI



**G**ubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melantik Komjen Pol Drs. Didid Widjanardi, S.H. sebagai Sekretaris Utama Lemhannas RI pada Kamis (14/5) di Ruang Nusantara, Lemhannas RI.

"Pelantikan dan pengangkatan sumpah merupakan suatu bagian dari dinamika yang biasa terjadi dalam suatu organisasi," kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Menurut Agus, dinamika tersebut merupakan sarana regenerasi dan penyegaran dalam pembinaan karir personel. Bagi Lemhannas RI, pelantikan jabatan juga memiliki makna penting dan strategis sebagai jawaban dari tuntutan dan tantangan tugas.

Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa jabatan sekretaris utama selaku

pejabat tinggi madya merupakan salah satu jabatan strategis pada suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan memiliki peran yang sangat menentukan bagi instansi pemerintah. "Kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan negara kepada pejabat yang dilantik merupakan amanah yang harus dijalani dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab," ujar Agus.

Agus juga berpesan agar Sekretaris Utama menyiapkan langkah-langkah strategis dengan mempertahankan apa yang sudah baik dan memperbaiki hal-hal yang menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan berbagai kegiatan di lingkungan Lemhannas RI dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sekretaris utama juga diharapkan mampu mewujudkan sinergitas diantara unit-unit kerja, menciptakan ide-ide yang kreatif dan inovatif guna

menunjang tugas sebagai pimpinan, mampu memotivasi dan memberi inspirasi pada jajaran dibawahnya agar Lemhannas RI mampu menunjukkan performa dan kinerja kelembagaan yang diharapkan.

Upacara Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Janji Sekretaris Utama Lemhannas RI tersebut hanya dihadiri oleh beberapa tamu undangan yakni Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Drs. Suhardi Alius, M.H, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firlil Bahuri, M.Si. serta beberapa perwakilan pejabat struktural Lemhannas RI.

# Peringati HUT ke-55, Lemhannas RI Rayakan secara Sederhana



**K**eadaan Indonesia yang sedang menghadapi Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19), membuat Lemhannas RI memperingati Hari Ulang Tahun ke-55 dengan menggelar rangkaian kegiatan yang mengutamakan jaga jarak fisik (physical distancing).

Rangkaian kegiatan seperti penyerahan bantuan Alat Pelindung Diri (APD), Penyerahan Bantuan Buku Tulis, Lomba Kebersihan, Lomba Tertib Administrasi Reformasi Birokrasi, dan Lomba Pegawai Teladan, tersebut juga dilaksanakan secara sederhana

Usai menyerahkan bantuan APD pada Rabu, 29 April 2020, dan memberikan Bantuan Buku Tulis Bagi Putra-Putri Personel Lemhannas RI pada Selasa (12/5), Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyerahkan hadiah kepada personel Lemhannas RI yang memenangkan lomba Kamis (14/5), di Ruang Nusantara, Lemhannas RI.

"Lomba dan pemilihan pegawai teladan pada dasarnya merupakan bentuk dari tanggung jawab dan implementasi kewajiban sebagai seorang abdi negara baik," kata Agus Widjojo dalam sambutannya. Lomba Kebersihan, Lomba Tertib Administrasi Reformasi Birokrasi, dan Lomba Pegawai Teladan dipilih menjadi serangkaian kegiatan karena dirasa penting bagi ASN, TNI, ataupun Polri untuk berlaku tertib dalam administrasi, serta peduli terhadap kebersihan lingkungan.

Pada kesempatan tersebut juga dibagikan bingkisan lebaran sebagai bentuk kebahagiaan dan terima kasih kepada seluruh personel yang selama ini telah mendedikasikan kinerjanya kepada Lemhannas RI. "Semoga semua ini dapat menjadi salah satu motivasi kita untuk dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi," ujar Agus.

Lomba pegawai teladan tahun 2020 diadakan bagi setiap golongan dan dimenangkan oleh beberapa personel

yakni Golongan III/Perwira Menengah oleh Kapten Sus Sundoko, S.Sos, Golongan II/Bintara oleh Ferdi Yansyah, A.Md, Golongan I/Tamtama oleh Kopda AD Doni Saputra Darma Raharja, Satuan Keamanan (Satkam) oleh Encep Lukmanul Hakim, Pramubakti oleh Joko Susanto, dan Cleaning Service oleh Dede Lutfi.

Kemudian Lomba Kebersihan Juara I diraih oleh Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Taplai Kedepujian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Juara II diraih oleh Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Utama, dan Juara III oleh Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Taplai Kedepujian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Sedangkan Lomba Tertib Administrasi Reformasi Birokrasi Juara I dimenangkan oleh Inspektorat, Juara II oleh Kedepujian Bidang Pengkajian Strategik, dan Juara III oleh Kedepujian Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional.

# Upacara Peringatan HUT Lemhannas RI ke-55



Lemhannas RI menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Lemhannas RI, dengan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo selaku inspektur upacara pada Rabu, (20/5) di Ruang Nusantara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus menyampaikan bahwa secara tersirat alasan Lemhannas RI diresmikan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional karena jiwa dan semangat perjuangan Lemhannas RI merupakan semangat kebangkitan nasional yang mampu mendorong bangkitnya kesadaran bersama untuk hidup bersatu dalam kebhinnekaan dan sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. "Jiwa dan semangat kebangkitan nasional inilah, yang seharusnya senantiasa dipedomani dan dipahami oleh seluruh jajaran dan keluarga besar Lemhannas RI dalam menjalankan tugas dan pengabdian," ujar Agus Widjojo.

Tema yang diangkat dalam peringatan HUT ke-55 Lemhannas RI yakni "Dengan Semangat Kebangkitan Nasional, Kita Bangun SDM Unggul Indonesia Maju" memiliki relevansi dengan situasi dan kondisi nasional saat ini. "Bersama tema ini, dan dengan

berlandaskan semangat kebangkitan nasional, Lemhannas RI melalui peran dan fungsinya, ingin menumbuhkan kembali semangat persatuan dan kesatuan dalam melawan virus COVID-19," kata Agus Widjojo.

Agus Widjojo juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh personel Lemhannas RI atas kerja keras dan berbagai capaian serta prestasi yang diraih Lemhannas RI. Namun, tetap harus disadari bahwa Lemhannas RI masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. "Lemhannas RI harus semakin peka dalam merespons berbagai dinamika kehidupan nasional dan beradaptasi dengan ekspektasi dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang terkait dengan peran Lemhannas RI ke depan," tutur Agus Widjojo.

Pada akhir amanatnya, Agus Widjojo mengingatkan kepada seluruh personel Lemhannas RI beberapa hal yang harus dipedomani. Hal pertama adalah memegang teguh dan mempertahankan cita-cita luhur dan marwah Lemhannas RI sebagai pengawal jati diri, karakter dan persatuan bangsa berdasarkan Empat Konsensus Dasar Bangsa. Selanjutnya, menjaga

komitmen dan konsistensi pengabdian Lemhannas RI dengan memperkuat soliditas dan kebersamaan berdasarkan semangat kegotongroyongan.

Kemudian, mengembangkan budaya pemikiran strategis yang menjangkau keluar (outward looking) dengan tetap berpedoman pada jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Terakhir adalah mencermati dan menyikapi secara cerdas berbagai isu aktual yang berkembang, agar Lemhannas RI tidak terjebak dalam penyebaran berita bohong yang menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat.

Upacara yang sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional tersebut, hanya dihadiri oleh beberapa pejabat struktural, pejabat fungsional, perwakilan personel dan peserta PPRA 60 serta PPRA 61. Sedangkan sejumlah personel Lemhannas RI lainnya mengikuti upacara secara dalam jaringan (daring). Hal tersebut dilakukan demi menjaga physical distancing sebagai upaya pencegahan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19), namun tentunya tidak mengurangi kekhidmatan dalam melaksanakan upacara.

# HARI ULANG TAHUN KE-



# 55

## LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

20 MEI 1965 - 20 MEI 2020

DENGAN SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL, KITA BANGUN SDM UNGGUL INDONESIA MAJU

Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI

Penanggung Jawab: **Sugeng Santoso** Redaktur: **Adri Koesdyanto**

Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto** Pembuat Artikel: **Naomi Augustina**

Penerjemah: **Magista Dian Fitrilia** Desain Grafis: **Arini Maulidia** Fotografer: **Suryadi**

Sekretariat: **Irina Sri Ekowati, C. Hildamona Permatasari, Mardiana Prihatini,**

**Gatot, Yatik Wulandari, Yusnadi**

Alamat Redaksi:

**Biro Humas Settama Lemhannas RI**, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. (021) 3832108, 3832109 Fax. (021) 3451926

Website <https://www.lemhannas.go.id>